



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00006/2026
Lampiran : 1 Halaman

9 Januari 2026

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Informasi atas Obligasi dan Sukuk
Mudharabah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Informasi atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah sebagai berikut:

- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021;
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021;
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021.

Bukti iklan informasi tersebut telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan situs web resmi Perseroan pada hari Jumat, 9 Januari 2026, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat,

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

PROGRAM MBG SENTUH 56,13 JUTA PENERIMA, SERAP HAMPIR 790 RIBU TENAGA KERJA

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengungkapkan capaian signifikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi salah satu program unggulan pemerintah.

Jakarta, HanTer - Hingga 7 Januari 2026, program ini telah menjangkau 56,13 juta penerima di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Tak hanya memperluas akses gizi masyarakat, MBG juga memberikan efek berganda terhadap



WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono

perekonomian nasional. Thomas menyebut, pelaksanaan program tersebut telah didukung oleh 19.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau central kitchen yang tersebar di berbagai daerah.

"Dari sisi ketenagakerjaan, program MBG telah menciptakan 789.319

lapangan kerja, mulai dari pengelola dapur, distribusi, hingga rantai pasok pangan lokal," kata Thomas dalam jumpa pers AP-BNKita di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Dari sisi anggaran, realisasi belanja MBG hingga 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp51,3 triliun. Dari jumlah tersebut, manfaat ekonomi langsung yang diterima masyarakat mencapai Rp43,3 triliun, mencerminkan kuatnya dampak fiskal program ini ke sektor riil. Pemerintah menilai MBG tidak hanya berfungsi sebagai program perlindungan sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong perputaran ekonomi daerah, memperkuat UMKK pangan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.

■ Eka

Ekonom CORE: Solusi Pekerja Migran Salah Satu Opsi Pemulihan Ekonomi

Jakarta, HanTer - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai penempatan korban banjir Aceh dan Sumatera sebagai pekerja migran dapat menjadi salah satu opsi pemulihan ekonomi pascabencana.

Menurut Faisal, bencana berskala besar seperti banjir di Sumatera tidak bisa dipulihkan dengan cepat, dimana selain bantuan darurat berupa kebutuhan sehari-hari dan dukungan finansial, lanjut dia, pemerintah perlu menyiapkan program jangka menengah dan panjang yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja.

"Opsi pekerja migran bisa menjadi solusi, tetapi harus digarap secara hati-hati," kata Faisal di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan banyak lapangan kerja hilang akibat bencana sehingga penciptaan peluang kerja membutuhkan waktu. Oleh karena itu, ia mengatakan penempatan sebagai pekerja migran dapat menjadi alternatif.

Namun, Faisal menekankan penempatan pekerja migran harus disertai program

pelatihan keterampilan, pendampingan, serta persiapan administrasi dan perlindungan hukum.

Pelatihan tersebut, lanjutnya, dapat menjembatani masyarakat mengingat latar belakang pekerjaan mereka beragam, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Dengan begitu, penempatan pekerja migran bisa lebih tepat sasaran.

Ia menambahkan opsi pekerja migran hanyalah salah satu jalan, sementara peluang kerja di daerah lain di luar wilayah terdampak juga harus ditumbuhkan.

Dengan demikian, ada opsi solusi untuk warga terdampak untuk mendapatkan pendapatan yang lebih berkelanjutan, bukan sekedar mengandalkan bansos saja," beber Faisal.

Sebelumnya, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan, warga di daerah terdampak banjir Sumatera akan diprioritaskan mendapat pelatihan dan ditempatkan di luar negeri sebagai pekerja migran.

■ Danial

DEFISIT APBN 2025 MEMBENGKAK RP695,1 TRILIUN

Menkeu Purbaya Tegaskan Fiskal Masih Aman

Jakarta, HanTer - Pemerintah melaporkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 berakhir dengan defisit Rp695,1 triliun.

Angka ini setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih lebar dibanding target awal yang dipatok sebesar 2,53 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, meski defisit melebar, posisi fiskal Indonesia tetap terkendali dan berada di bawah batas aman 3 persen PDB.

"Defisitnya memang naik, tapi tetap kami jaga agar tidak menembus 3 persen. Ini penting untuk menjaga kredibilitas fiskal," kata Purbaya dalam konferensi pers APBNKita, Kamis, 8 Januari 2026.

Dari sisi penerimaan, pendapatan negara hingga 31 Desember 2025 tercatat Rp2.756 triliun, atau 91,7 persen dari target APBN.

Kontribusi terbesar masih berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp1.917,9 triliun.

Sementara kepabeanan dan cukai menyumbang Rp300,3 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp534,1 triliun.

Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp3.451 triliun, setara 95,3 persen dari pagu APBN 2025.

Tingginya realisasi belanja inilah yang menjadi pemicu utama pelebaran defisit anggaran sepanjang tahun lalu.

Tekanan fiskal juga tercer-

min dari keseimbangan primer yang mencatat defisit Rp180,7 triliun, mengindikasikan beban pembiayaan masih cukup berat di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, Purbaya optimistis kondisi fiskal akan membaik pada 2026. Ia meyakini penguatan fondasi ekonomi dan momentum pertumbuhan yang lebih solid akan membuka ruang penurunan defisit dengan dampak ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

"Dengan pondasi ekonomi yang membaik, defisit 2026 seharusnya bisa ditekan lebih rendah, dengan dampak pertumbuhan yang lebih besar dibanding tahun sebelumnya," pungkas dia.

■ Eka

IHSG Hampir Tembus 9.000, Menkeu Purbaya: Investor Mulai Percaya, Target 10.000 Bukan Mustahil

Jakarta, HanTer - Lonjakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang hampir menyentuh level 9.000 dinilai mencerminkan kembalinya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pasar modal bersifat forward looking dan merespons implementasi nyata, bukan sekadar retorika.

"Investor itu forward orientated. Kalau mereka tidak percaya langkah-langkah kita, mau saya bicara sampai busa-busa pun mereka tidak akan masuk," kata Purbaya, Kamis, 8 Januari 2026.

Menurutnya, arus dana yang kembali deras ke pasar modal domestik terjadi karena investor melihat kebijakan pemerintah benar-benar dijalankan, meskipun belum sepenuhnya



PURBAYA YUDHI SADEWA

sempurna.

Namun, arah kebijakan tersebut dinilai memberi prospek positif bagi perekonomian nasional ke depan.

"Ketika mereka lihat ada implementasi yang nyata, walaupun tidak sempurna, tapi ke depan

out/FOMO) untuk masuk ke pasar modal Indonesia.

Hal ini tercermin dari aliran modal asing yang terus mencatatkan tren positif dalam dua hingga tiga bulan terakhir.

"Flownya ke kita sudah positif terus. Itu menunjukkan adanya perbalikan sentimen investor, baik domestik maupun global, terhadap ekonomi Indonesia," katanya.

Ia menekankan, momentum positif ini harus terus dijaga melalui konsistensi kebijakan dan stabilitas ekonomi makro.

Dengan sentimen yang semakin kuat dan fundamental ekonomi yang dinilai membaik, Purbaya bahkan optimistis IHSG masih memiliki ruang penguatan lebih lanjut.

"Kalau kondisinya seperti ini, tahun ini IHSG ke level 10.000 itu tidak susah-susah amat," tutup Purbaya dengan optimis.

■ Eka

Kemenkop Terus Dampingi Puluhan Kopdes/Kopkel di Aceh dan Sumatera

Jakarta, HanTer - Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengatakan siap terlibat dalam upaya pemulihan dan pemberdayaan masyarakat khususnya anggota koperasi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara setelah masa tanggap darurat bencana dinyatakan berakhir.

Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengatakan Kemenkop siap mengambil peran strategis dalam mendampingi koperasi yang terdampak bencana agar kembali aktif.

"Kami akan terus melakukan pendampingan khususnya bagi koperasi-koperasi yang ada di tiga wilayah tersebut, baik koperasi eksisting maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Farida dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Berdasarkan data se-

mentara kementerian, terdapat 19 koperasi eksisting dan 27 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih terdampak di Aceh, sembilan koperasi eksisting dan 20 Kopdes di Sumatera Utara, serta tujuh koperasi eksisting dan sembilan Kopdes di Sumatera Barat.

Percepatan pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung Kopdes/Kopkel Merah Putih menjadi prioritas dengan skema padat karya, sehingga masyarakat tidak hanya terlibat dalam rehabilitasi, tetapi juga memperoleh penghasilan langsung, katanya menambahkan.

Selain itu, Farida mengatakan bahwa Kemenkop menyiapkan program pendampingan keterampilan bagi anggota koperasi yang sebelumnya memiliki usaha produktif.

"Pendampingan berupa

peningkatan keterampilan nantinya akan menjadi bekal pengembangan usaha di koperasi desa," katanya.

Dari sisi pembiayaan, Farida mengatakan bahwa Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) memberikan relaksasi kredit bagi koperasi terdampak bencana yang sebelumnya menerima pembiayaan.

Relaksasi itu berupa penundaan pembayaran kredit selama satu tahun, sehingga koperasi memiliki ruang untuk memulihkan usahanya.

Kemenkop juga telah mendirikan posko koperasi di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam sebagai pusat konsultasi, penyaluran bantuan logistik, serta pendampingan usaha agar koperasi terdampak segera beroperasi kembali, katanya menambahkan.

■ Danial

PEMBERITAHUAN KELALAIAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 14, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwalimamatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-19 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C yang jatuh tempo tanggal 3 Desember 2025 dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Jakarta, 9 Januari 2026

WALI AMANAT

PT BANK MEGA Tbk

PEMBERITAHUAN KELALAIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 3, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimamatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Bunga ke-17 Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C yang jatuh tempo tanggal 8 Desember 2025 dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Jakarta, 9 Januari 2026

WALI AMANAT

PT BANK MEGA Tbk

PEMBERITAHUAN KELALAIAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP II TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021, Akta No. 11, tanggal 8 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwalimamatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Bunga ke-19 Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 Seri A, B, dan C yang jatuh tempo tanggal 3 Desember 2025 dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021 akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Jakarta, 9 Januari 2026

WALI AMANAT

PT BANK MEGA Tbk

PEMBERITAHUAN KELALAIAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalimamatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021, Akta No. 7, tanggal 2 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Waristo, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya ("Perjanjian Perwalimamatan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 bahwa PT Wijaya Karya (Persero) Tbk telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Ke-17 Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri B dan C yang jatuh tempo tanggal 8 Desember 2025 dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 akan segera melakukan tindakan-tindakan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwalimamatan.

Jakarta, 9 Januari 2026

WALI AMANAT

PT BANK MEGA Tbk